

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Ridhonya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 dapat tersusun. LKjIP disusun sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023.

LKjIP juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja. Melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program kegiatan yang telah dicapai sehingga dalam perumusan kebijakan ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala dan permasalahan yang ada dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 ini, diharapkan semua pihak yang mendukung dan terkait mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 5 Februari 2024

Sekretaris DPRD Kota Blitar



Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD dimana dalam Perwali disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan unsur pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Blitar dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar bertujuan untuk memberikan fasilitas atau layanan terbaik dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat DPRD Kota Blitar telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026, yang merupakan turunan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, serta acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan lima tahunan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam upaya peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Blitar guna memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “ **Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat**”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kota Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Misi Pemerintah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar mengemban amanah dalam pencapaian Misi ke-5 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi".

Untuk mendukung misi ke - 5 Pemerintah Kota Blitar maka Sekretariat DPRD menentukan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yaitu "**Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD**" dengan **sasaran** :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.
2. Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Sasaran dimaksud telah ditetapkan dalam Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD dengan target capaian kinerja (IKM = 80,5/baik);
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target capaian kinerja (IKM = 80,5/baik)
3. Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah dengan target capaian kinerja (IKM = 80,5/baik)
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah dengan target capaian kinerja (Nilai SAKIP : A / 85)

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dimaksud pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan 2 (dua) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, 43 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.507.968.340,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh

Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dan realisasi anggaran pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.990.175.234,64 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Empat Sen) atau direalisasikan 92,01%.

Tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD

Target : Nilai Indek SKM : 80,5

Realisasi : Nilai Indek SKM : 90,25

Pada Sasaran 1 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai, terbukti dengan Interpretasi Capaian IKU yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90,25 atau 112,11%

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah

Indikator Kinerja : Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah

Target : Nilai Indek SKM : 80,5

Realisasi : Nilai Indek SKM : 90

Pada Sasaran 2 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai, terbukti dengan Interpretasi Capaian IKU yaitu Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90 atau 111,80%

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A

Target : Baik (Nilai Sakip : 85)

Realisasi : Baik (Nilai Sakip : 82,93)

Indikator kinerja sasaran ke 3 (tiga) adalah merupakan hasil penilaian Sakip Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023, diperoleh nilai A (82,93) dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85 atau 98,10%.

Gambaran dan analisa hasil capaian survey kepuasan yang disajikan dalam laporan ini, diharapkan merupakan cerminan tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar sehingga hasil survey dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Blitar kepada Anggota DPRD Kota Blitar dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar serta peningkatan kinerja DPRD Kota Blitar sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang pada gilirannya diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan DPRD bersama Pemerintah Kota Blitar.

Blitar, 5 Februari 2024
Sekretaris DPRD Kota Blitar

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 2

DAFTAR ISI..... 6

BAB I PENDAHULUAN..... 7

A. Latar Belakang..... 7

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 8

C. Maksud dan Tujuan 11

D. Dasar Hukum 11

E. Aspek-Aspek Strategis 13

F. Isu-Isu Strategis 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

A. Rencana Strategis 2021-2026 15

B. Perjanjian Kinerja 2023..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran..... 36

1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 202 36

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021-2023..... 45

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra 47

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) 48

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)..... 49

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 52

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran..... 52

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69

C. Prestasi/Penghargaan 70

BAB IV PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71

B. Langkah Perbaikan 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (Tabel 5.1 dan 6.1)

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja berdasarkan tujuan sasaran dan perjanjian yang telah ditetapkan dan permasalahan yang dihadapi setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 memuat informasi tentang capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, penyusunan LKjIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah :

1. Memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, dan pada tahun 2023 diubah lagi dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2023, Peraturan Walikota Blitar ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. TUGAS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

2. FUNGSI

Adapun fungsi Sekretariat DPRD untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. fasilitas penyelenggaraan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan keuangan;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- f. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja dilingkungan kantor;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Kota Blitar, maupun website DPRD Kota Blitar;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- m. penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Penyusunan RKA dan PRKA Sekretariat DPRD;
- o. Menyampaikan DPA/DPPA Sekretariat DPRD kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah;
- p. Menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja daerah;
- q. Mengkoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- r. Menetapkan PPK Sekretariat DPRD untuk melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Sekretariat DPRD; dan
- s. Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD;
- b. Perencanaan operasional Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan hubungan antar lembaga; dan

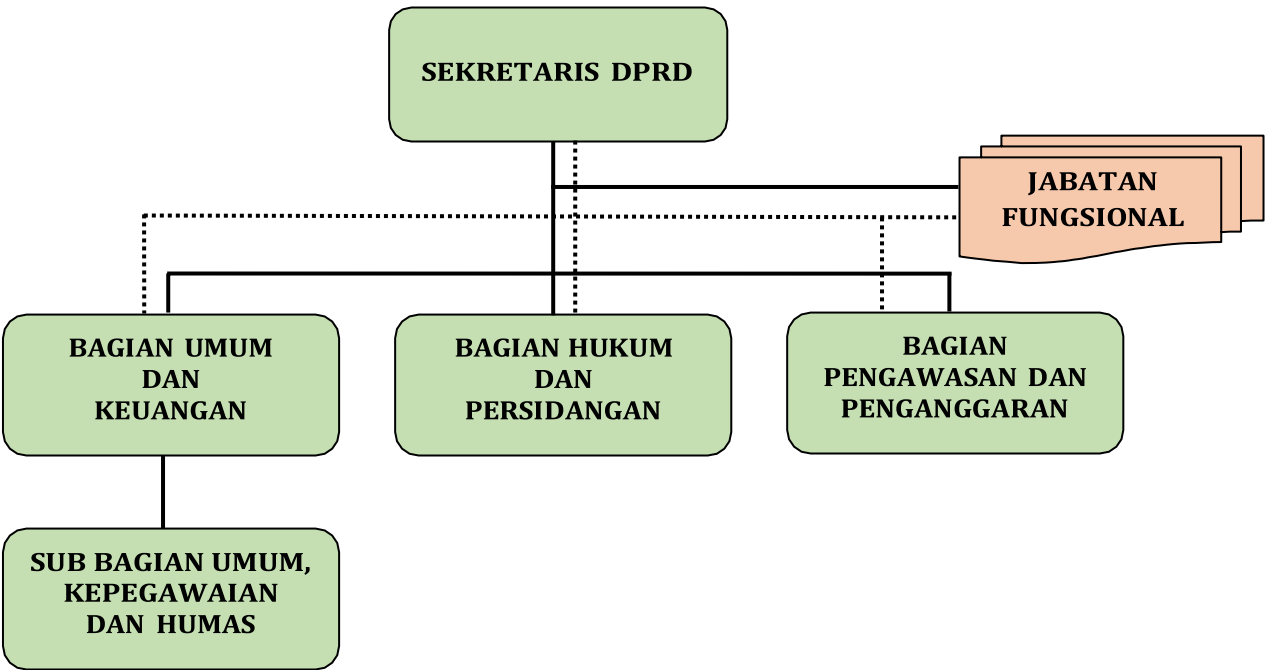
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas DPRD;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Blitar (Gambar 1) dijelaskan sebagai berikut :

- Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD (membawahi 3 Bagian)
 - b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
 - d. Bagian Pengawasan dan Penganggaran
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar : 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KOTA BLITAR**



Berdasarkan : Perwali Kota Blitar No. 56 Tahun 2022
Tanggal : 22 Juni 2022

Dari penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat DPRD Kota Blitar diatas pada intinya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi atau sebagai fasilitator seluruh kegiatan Anggota DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LKjIP) :

1. Memberikan informasi mengenai hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2023.
2. Sebagai dasar evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 untuk mengetahui permasalahan dan hambatan serta solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta merencanakan upaya-upaya memperbaiki kinerja di masa datang.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek strategis yang mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar antara lain :

A. Faktor Internal :

1. Struktur Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - Sekretaris DPRD,
 - Kepala Bagian,
 - Kepala Sub Bagian,
 - Jabatan Fungsional hasil penyetaraan yang terdiri dari :
Perencana Ahli Muda, Perisalah Legislasi Ahli Muda, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
3. Tersedianya tenaga alih fungsi yang cukup untuk membantu pelaksanaan tugas ASN pada Sekretariat DPRD Kota Blitar.
4. Tersedianya Tata Tertib DPRD Kota Blitar yang dituangkan dalam Peraturan DPRD Kota Blitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD.
6. Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi berupa tersedianya layanan pendukung tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk Aplikasi Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) : e-RADAR sehingga mempermudah dan mempercepat pencatatan dalam notulensi rapat-rapat DPRD.
7. Peningkatan kualitas fasilitasi dan optimalisasi fasilitasi kinerja DPRD melalui SI-KAWAN (Sistem Informasi Kinerja Dewan).

Kekuatan : Terjalinnnya kerjasama yang baik antara sekretariat DPRD dan anggota DPRD sehingga setiap kegiatan yang di laksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal maupun agenda.

Kelemahan : Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitasi berbasis teknologi

B. Faktor Eksternal :

1. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
2. Hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD Kota Blitar, DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Daerah atau OPD terkait/Mitra Kerja.
3. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga dan Tim ahli sebagai Narasumber dalam rangka mendukung peningkatan kinerja DPRD.

Peluang :

Masa periode anggota DPRD periode 2019-2024 maka Tahun 2023 merupakan tahun terakhir sebelum masa jabatan berakhir sehingga anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dapat berjalan optimal sesuai dengan tri fungsi DPRD.

Tantangan :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPRD perlu untuk masih memahami tri fungsi DPRD utamanya bagi anggota DPRD yang baru 1 periode menjadi anggota DPRD

F. ISU-ISU STRATEGIS

Sejauh ini tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2022 telah memenuhi target yaitu sasaran 1 tercapai dengan nilai indeks kepuasan yaitu 80,87 dari rencana target 80, sasaran 2 tercapai dengan nilai indeks kepuasan 80,76 dari rencana target 80 dan sasaran 3 dengan hasil nilai indeks kepuasan 81,47 dari rencana target 80, artinya capaian target pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 telah sesuai dan melebihi dengan rencana target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tahun 2023, sampai dengan Tri bulan II (Bulan Januari sampai dengan April 2023) secara keseluruhan telah terealisasi 24,86% dari target realisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 50% dengan rincian program utama yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 12.179.041.370,- realisasi Rp. 2.732.433.415 atau 22,44 %, sedang program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 20.721.822.930,- terealisasi sebesar Rp. 5.445.289.036,- atau 26,28%. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 (Januari s/d April) adalah :

1. Tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah sebagai fasilitator yang melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD. Konsistensi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPRD sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja.
2. Ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada Tribulan III dan IV.

Adapun Isu – isu strategis yang digunakan sebagai catatan dalam menentukan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “ Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD” adalah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator perlu dilakukan peningkatan SDM aparatur dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan kapasitas DPRD dan berupaya menyamakan persepsi/kesepahaman dengan DPRD dalam menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjawab permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar mengambil langkah - langkah kebijakan dan solusi antara lain :

1. Mengawal dan menjaga konsistensi rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan peran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar selama 5 (lima) tahun.

Didalam Visi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah ” **TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT** ”. Dan untuk mewujudkan Visi dimaksud Pemerintah Kota Blitar menetapkan 5 (lima) Misi, yaitu :

- Misi 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4 : Meningkatkan Infrstruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dari 5 (lima) misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Blitar dalam menunjang keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unit pendukung melaksanakan misi yang ke 5 yaitu “ Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi ”

Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1.A

Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD

RPJMD TAHUN 2021-2026	RENSTRA TAHUN 2021-2026
VISI	TUJUAN
KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL MAKMUR dan BERMARTABAT	1. Meningkatnya Kualitas Fasilitas Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
MISI 5	SASARAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	1. Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daaerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
TUJUAN :	INDIKATOR
MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI SEKRETARIAT DPRD BAGI PENINGKATAN KINERJA DPDR	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
SASARAN :	PROGRAM
1. Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Meningkatnya Fasilitas fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah. 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah.	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

Tabel 2.2.A
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Target Kinerja
Tujuan/Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				2020	2023	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD			80	80	80,5	81	81,5	82	
		Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	80	80,5	81	81,5	82	
		Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggotaDPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasanDPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	80	80,5	81	81,5	82	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	A	A (84)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan bersama antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 Tahun 2014.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Sekretaris DPRD Kota Blitar untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b. Menentukan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu pada Visi Misi Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan Tujuan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 B.1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80.50 (nilai)
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80.50 (nilai)
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	85.00 (nilai)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.324.465.138,00	APBD/DAU
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.183.503.202,00	APBD/DAU
	TOTAL	31.507.968.340,00	APBD/DAU

Tabel 1.2.2
Pagu Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Sekretariat DPRD

NO.	No.Rek	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target	PAGU Murni	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.02.0.00. 0.00.01.00 00	SEKRETARIAT DPRD			32.900.864.300	SEKRETARIAT DPRD			31.507.968.340	(1.392.895.960)
I	4.02.0.00. 0.00.01.00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	20.721.822.930	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	19.324.465.138	(1.397.357.792)
1	402.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.582.818	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	30.258.176	(6.324.642)
1.1	402.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	17.505.950	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	14.325.950	(3.180.000)
1.2	402.01.2.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	19.076.868	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	15.932.226	(3.144.642)

2	402.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.866.684.755	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.775.084.755	(91.600.000)
2.3	402.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bulan	2.866.684.755	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bulan	2.775.084.755	(91.600.000)
3	402.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrase kepegawaian peraangkat daerah sesuai standar	100%	163.565.500	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrase kepegawaian peraangkat daerah sesuai standar	100%	123.315.500	(40.250.000)
3.4	402.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	25 paket	40.492.500	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	25 paket	34.492.500	(6.000.000)
3.5	402.01.2.05.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 event	123.073.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 event	88.823.000	(34.250.000)
4	402.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daaerah sesuai standar	100%	765.096.432	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daaerah sesuai standar	100%	862.662.116	97.565.684
4.6	402.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	56.414.125	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	56.414.125	-
4.7	402.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	135.516.301	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	138.557.229	3.040.928

4.8	402.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	39 paket	56.796.800	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	39 paket	84.749.506	27.952.706
4.10	402.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	132.357.956	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	149.135.206	16.777.250
4.11	402.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	48 dokumen	28.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	48 dokumen	21.600.000	(7.200.000)
4.12	402.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	98.103.200	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	153.588.000	55.484.800
4.13	402.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	257.108.050	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	258.618.050	1.510.000
5	402.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.819.025.653	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	499.475.291	(1.319.550.362) Rasionalisasi
5.14	402.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	1.498.431.646	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	6.780.488	(1.491.551.158)
5.14	402.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	320.594.007	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	492.694.803	205.000.000
5.15	402.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Rasionalisasi

6	402.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.030.758.384	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.023.058.384	(7.700.000)
6.16	402.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	189.411.384	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	181.711.384	(7.700.000)
6.17	402.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	841.347.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	841.347.000	-
7	402.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.049.837.813	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.032.143.913	(17.693.900)
7.17	402.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 unit	418.469.663	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 unit	418.469.663	-
7.18	402.1.02.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	89 unit	243.133.150	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	89 unit	225.439.250	(17.693.900)
7.19	402.1.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	364.235.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	364.235.000	-
7.20	402.1.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	24.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	24.000.000	-

8	402.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.990.271.575	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.978.467.003	(11.804.572)
8.21	402.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang/bulan	12.608.444.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang/bulan	12.620.389.428	11.945.428
8.22	402.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	14 paket	306.827.575	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	14 paket	283.077.575	(23.750.000)
8.23	402.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	75.000.000	-
II	402.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	12.179.041.370	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	12.183.503.202	4.461.832
9	4.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai standar	100%	2.441.612.896	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai standar	100%	2.136.865.244	(304.747.652)
9.24	4.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	5 dokumen	159.285.200	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	5 dokumen	146.096.200	(13.189.000)
9.25	4.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda	10 dokumen	2.030.627.696	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda	10 dokumen	1.839.669.044	(190.958.652)

9.26	4.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	1 dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	1 dokumen	50.000.000	(25.000.000)
9.27	4.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	75.000.000	(75.000.000)
9.28	4.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	2 dokumen	26.700.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	2 dokumen	26.100.000	(600.000)
10	4.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.795.616.968	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.691.863.968	(103.753.000)
10.29	4.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	280.375.553	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	208.070.053	(72.305.500)
10.30	4.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	357.914.031	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	179.714.531	(178.199.500)
10.31	4.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	381.358.207	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	606.368.207	225.010.000
10.32	4.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	381.293.261	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	358.009.261	(23.284.000)
10.33	4.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	394.675.916	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	339.701.916	(54.974.000)
11	4.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	650.661.931	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	407.289.454	(243.372.477)

11.34	402.02.2.03 .07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan Penggunaan anggaran	12 dokumen	248.598.500	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan Penggunaan anggaran	12 dokumen	148.098.500	(100.500.000)
11.34	402.02.2.03 .08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah hasil rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawabana kepala daerah	2 dokumen	402.063.431	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah hasil rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawabana kepala daerah	2 dokumen	259.190.954	(142.872.477)
12	402.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.095.239.549	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.010.922.549	(84.317.000)
12.35	402.02.2.04 .01	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	1.518.561.000	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	1.518.561.000	-
12.36	402.02.2.04 .03	Sub Kegiatan Publikasidan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum, Publikasi dan dokumentasi dewan	5 dokumen	716.778.549	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum, Publikasi dan dokumentasi dewan	5 dokumen	816.778.549	100.000.000
12.37	402.02.2.04 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar/tim ahli	7 orang	296.070.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar/tim ahli	7 orang	236.070.000	(60.000.000)
12.38	402.02.2.04 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD	4 orang	228.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga AhliFraksi DPRD yangtersedia	4 orang	228.000.000	-
12.39	402.02.2.04 .07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja	1 dokumen	335.830.000	Sub Kegiatan Penyusunan Program KerjaDPRD	Jumlah dokumen rencana kerja	1 dokumen	211.513.000	(124.317.000)
13	402.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	1.069.005.461	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	1.182.618.136	113.612.675

13.40	402.02.2.05 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil reses	75 dokumen	1.069.005.461	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil reses	75 dokumen	1.182.618.136	113.612.675
14	402.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat - rapat DPRD sesuai standar	100%	3.126.904.565	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat - rapat DPRD sesuai standar	100%	3.753.943.851	627.039.286
14.41	402.02.2.08 .01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	11 dokumen	3.068.054.565	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	11 dokumen	3.695.093.851	627.039.286
14.42	402.02.2.08 .02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	58.850.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	58.850.000	-

Tabel 2 B.2
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2023

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja dan anggaran	
		target	pagu
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Indek kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	80,5	31.507.968.340
SASARAN 1			
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	19.324.465.138
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	12.183.503.202
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.136.865.244
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokume n	146.096.200
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda	10 dokume n	1.839.669.044
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	1 doku emn	50.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik yang difasilitasi	1 dokume n	75.000.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	2 dokume n	26.100.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.010.922.549
Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6dokumen	1.518.561.000

Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	5 dokumen	816.778.549
Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 TA	236.070.000
Penyediaan Tim Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 orang	228.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	211.513.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.753.943.851
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	11 dokumen	3.695.093.851
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	58.850.000
SASARAN 2			
Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	2.537.464.600
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	2.537.464.600
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.691.863.968
Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 laporan	208.070.053
Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 laporan	179.714.531
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 laporan	606.368.207
Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 laporan	358.009.261
Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 laporan	339.701.916
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	407.289.454

Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	12 laporan	259.190.954
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 dokumen	148.098.500
Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	1.182.618.136
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	75 dokumen	1.182.618.136
SASARAN 3			
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	85	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	19.324.465.138
Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	30.258.176
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	14.325.950
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	15.932.226
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.775.084.755
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org	2.775.084.755
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	123.315.500
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	25 paket	34.492.500
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	88.823.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	862.662.116
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	39 paket	56.414.125

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	138.557.229
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	39 paket	84.749.506
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang paket cetakan dan pengadaan yang disediakan	10 paket	149.135.206
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	21.600.000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	153.588.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	258.618.050
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	499.475.291
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			6.780.488
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	492.694.803
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.023.058.384
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	181.711.384
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	841.347.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.032.143.913
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau bayarkan pajak dan perijinannya	29 unit	418.469.663
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	89 unit	225.439.250
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	364.235.000

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	7 unit	24.000.000
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.978.467.003
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang	12.620.389.428
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	14 paket	283.077.575
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	75.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan tujuandan sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tertuang dalam perumusan Rencana Strategis sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Blitar.

Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2023, berikut akan diuraikan pengukuran kinerja, akuntabilitas keuangan termasuk penghitungan efisiensi sumber daya sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dancapaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga akan terlihat apakah target capaian yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum dapat dilihat beberapa keberhasilan pencapaian targetkinerja, namun demikian masih perlu peningkatan pada beberapa target yang telah dicapai tahun 2023. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan sertapencapaian sasaran strategis.

1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada

tabel 2.B.1 LKjIP ini. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada akhir tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.A.1.1

CAPAIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

TAHUN 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas)	Angka	80,5	90,25	112,11	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	Angka	80,5	90	111,8	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat

3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	Hasil evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	Angka	85	82.39	96,93	Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat
---	---------------------------------------	--	---------------------------------------	-------	----	-------	-------	--

Apabila dijelaskan dengan perhitungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas)	80,5	90,25	112,11 (sangat berhasil)

Pada Tahun 2023 DPRD Kota Blitar menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Propemperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Blitar 188/19/410.040/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 beserta perubahannya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Blitar Nomor 188/12/410.040/DPRD/2023 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 yang direncanakan sebanyak 12 (dua belas) Raperda yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kepariwisataa

7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dari 12 (dua belas) Propemperda Tahun 2023 yang dijadwalkan pembahasannya, sebagaimana ditetapkan Badan Permusyawaratan DPRD Kota Blitar ada 9 (sembilan) Raperda yang dibahas sampai dengan ditetapkan menjadi Perda, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Sedangkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar pada Propemperda Tahun 2023 telah dilaksanakan pembahasan namun masih menunggu hasil dari fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kepariwisataaan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2023 untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran 1, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan survey kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan target Target Sasaran 1 hasil survey adalah nilai 80,5, sedangkan nilai hasil survey adalah 90,25. Ini menunjukkan bahwa nilai hasil survey telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian kinerja adalah 112,11. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar untuk Sasaran 1 adalah sangat berhasil di karenakan terdapat beberapa faktor yang menunjang pada sasaran1 yaitu :

- Faktor Pendukung : Ketepatan waktu pembahasan perda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- Faktor Penghambat : Adanya perubahan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan.
- Tindak lanjut : Pelaksanaan pembahasan akan disesuaikan dengan ketentuang yang berlaku.

Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
2	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM fasilitas Sekretariat DPRD (IKM fasilitas Fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80,5	90	111,8 (sangat berhasil)

Indikator kinerja utama pada sasaran 2 adalah untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Blitar terhadap fasilitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fasilitas fungsi pengawasan dan penganggaran dengan jalan melaksanakan SKM terhadap tugas dan fungsi pengawasan serta pembahasan kebijakan anggaran daerah. Pengawasan dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Tinjauan Lapangan yang dilakukan Pimpinan dan atau Komisi DPRD pada Mitra Kerja OPD berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Sedangkan fungsi anggaran dengan melaksanakan pembahasan anggaran daerah.

Pada Tahun 2023 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan DPRD Kota Blitar telah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemerintahan. Rekomendasi tersebut antara lain :

1. Rekomendasi DPRD Kota Blitar, Nomor : 174/128.3/410.040.3/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan dan Sirkuit Sentul Kota Blitar
2. Rekomendasi DPRD Kota Blitar, Nomor : 174/162/410.040.3/2023, tanggal 08 Desember 2023 terkait Permasalahn Pailit PT. Bokor Mas dan PT. Pura Angkasa Jaya

Pada tahun 2023 untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan survey kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan target Target Sasaran 2 hasil survey adalah nilai 80,5, sedangkan nilai hasil survey adalah 90,25. Ini menunjukkan bahwa nilai hasil survey telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian kinerja adalah 111,8. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar untuk Sasaran 2 adalah berhasil di karenakan terdapat beberapa faktor yang menunjang pada sasaran1 yaitu :

- Faktor Pendukung : Dalam Melakukan fasilitasi DPRD fungsi pengawasan dan penganggaran memiliki SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Faktor Penghambat : Perlunya meningkatkan kemudahan prosedur, system dan mekanisme fasilitasi/layanan penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan masih dilakukan secara manual
- Tindak Lanjut : Dalam pelaksanaan setiap kegiatan akan di berikan buku panduan agar lebih memahami prosedur pelaksanaan kegiatan serta setiap pelaporan akan dilaksanakan secara online

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal A	Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	A (85) baik	A 82,39 baik	baik

Indikator kinerja utama dari sasaran 3 diukur dari hasil evaluasi penilaian Sakip Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023. Pada Tahun 2023 menetapkan target nilai Sakip adalah 85, sedang hasil penilaian tidak sesuai target dengan realisasi 82.39. Ini menunjukan bahwa target sasaran 3 tidak tercapai sesuai target dengan nilai A=82.39 (Baik) dikarenakan ada beberapa faktor yang menunjang sasaran ke 3 yaitu :

- Faktor Pendukung : Tingkat kepuasan dalam memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas di dukung oleh SDM yang memadai.
- Faktor Penghambat : Peraturan dan Kebijakan yang sering berubah ubah sehingga dalam setiap kegiatan diperlukan perbaikan.
- Tindak Lanjut : Fasilitasi DPRD akan selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Hasil rekomendasi penerapan Sakip Tahun 2023 yang harus di lakukan :

1. Dalam melakukan publikasi dokumen renstra hendaknya mematuhi tanggal yang telah diatur secara tepat waktu
2. Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan data yang telah disajikan dalam aplikasi A-SAKIP.
3. Melakukan monitoring berjenjang terhadap capaian kinerja seluruh jajarannya secara optimal.
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (Refocusing)

- maupun dalam penyesuaian strategi pencapaian kinerja.
- Memberikan pengarahan dan mensosialisasikan hasil pengukuran kinerja untuk dapatnya dipahami oleh seluruh pegawai.
 - Dalam penyajian data pada dokumen laporan kinerja berikutnya dilengkapi dengan menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional.
 - Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya.
- Pelaksanaan Survey Kepuasan terhadap Anggota DPRD Kota Blitar dilaksanakan pada bulan Nopember 2023 dengan cara melalui aplikasi E-Sukma dengan obyek 25 Anggota DPRD Kota Blitar untuk diminta pendapatnya terkait jenis fasilitasi yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar.
- Untuk menentukan hasil capaian indikator dilakukan rekapitulasi hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD.
- Rekapitulasi perhitungan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.A.2.1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) SEKRETARIAT DPRD KOTA
BLITAR TAHUN 2023

No	JENIS FASILITASI	NILAI RATA - RATA PER-FASILITASI	KETERANGAN
1.	Fasilitasi/layanan Pembahasan Raperda serta Peningakatan Kapasitas DPRD	90.25	
2.	Fasilitasi/layanan fumgsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	90	
	JUMLAH TOTAL	180,25	
	NILAI IKM	90,1	

Berdasarkan hasil penghitungan survey Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kota Blitar terhadap pelaksanaan fasilitasi/pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar kepada 25 orang Anggota DPRD Kota Blitar, nilai IKM adalah 90.12 yang apabila dilihat dari Nilai Interval Konversi SKM nilai antara (76,61 – 88,30) adalah dalam katagori “ BAIK “. Dengan demikian capaian IKU 4 dari tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Blitar dapat dikatakan telah sesuai dengan target yang ditetapkanyaitu “BAIK”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2023 dengan target Renstra dan Realisasi Nasional

Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD. Hal tersebut dapat dipahami karena Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan bukan merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.A.2.1
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Sasaran /IKU	Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	80	80,87	101,01	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	80	80,76	100,95	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	84	85,06	101,26	Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat

4.	Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	80	80,91	101,13	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD semakin meningkat
----	---	---	----	-------	--------	---

Tabel 3.A.2.2
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Sasaran /IKU	Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	80,5	90,25	101,09	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	80,5	90	111,8	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	85	82,89	96	Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat
4.	Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	80,5	90,1	111	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD semakin meningkat

Keterangan :

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya perubahan atau perbedaan indikator kinerja sasaran pada Renstra yang menjadi IKU Sekretariat DPRD Kota Blitar. Dimana indikator kinerja pada tahun 2022 diukur dari jumlah presentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD, sedangkan pada tahun 2023 diukur dari nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD guna meningkatkan kinerja DPRD. Untuk dapat melihat lebih jelas maka realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan realisasi capaian kinerja tahun 2023 disajikan secara terpisah yaitu Realisasi capaian kinerja tahun 2022 disajikan pada tabel 3.A.2.1, sedangkan realisasi capaian kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel 3.A.2.2

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.A.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Thn 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	82	90,25	110
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	82	90	109
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	86,5 (baik)	82,39	95,2

Keterangan :

Realisasi capaian Kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja akhir periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2021-2026, tingkat kemajuan dapat dilihat pada tabel 3.A.3.1 yaitu sebagai berikut :

- Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2023 : 90,25, tingkat kemajuan perbandingan : 110
- Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2023 : 90, tingkat kemajuan perbandingan : 109
- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, Target kinerja : 86,5, realisasi pada tahun 2023 : 82,39, tingkat kemajuan perbandingan : 95,2

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2023 telah melebihi target yang diharapkan pada akhir tahun Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedang Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah merupakan OPD pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan dalam menyelenggarakan pemerintahan sampai saat ini belum ada Standar Pelayanan Minimal terhadap publik sebab pada dasarnya Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam fungsi Anggaran, Pengawasan dan Propemperda, sehingga SPM pada Sekretariat DPRD tidak diatur dan bukan merupakan hal wajib. Untuk itu tidak ada yang dapat dibandingkan, baik SPM pada Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur, Tingkat Nasional maupun SPM pada Sekretariat DPRD diwilayah Kabupaten atau Kota terdekat. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Blitar.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Selain pertanggungjawaban kinerja utama, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penganggaran untuk membiayai pencapaian kinerja utama tersebut. dalam melaksanakan fasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2023 melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Permendagri Nomor 090-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara rinci Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

Jumlah pagu anggaran Belanja pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 secara keseluruhan Rp. **31.507.968.340,00** (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dari total anggaran tersebut sampai pada akhir bulan Desember 2023 realisasi sebesar Rp. **28.990.175.234,64** (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Empat Sen).

Sedang secara teknis operasional diuraikan dalam bentuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
4. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 6. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

- 5. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 6. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

B.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui jumlah anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 disajikan data sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Sasaran	Indikator	Jml Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	8.901.731.644	28,30 %
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	3.281.771.558	10,40 %
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal “A”	19.324.465.138	61,30%
JUMLAH			31.507.968.340	100%

B.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Pengukuran pencapaian kinerja keuangan per tujuan dan / atau sasaran yang menjadi kinerja utama (cost per outcome), dihitung dengan cara sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Blitar
Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2023**

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
						K	Rp	K	Rp	K	A			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD				Angka		31.507.968.340,00		28.990.175.234,64	90,1	92,01			Tindak ada tindaklanjut rekomendasi DPRD sebab tahun 2022 tidakada catatan dan rekomendasi dari DPRD
			PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,5	19.324.465.138	90,1	18.384.784.722	111	97,03	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat Waktu dan sesuai standar	persen	100%	30.258.176	100%	14.186.800	100%	46,89	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7 dokumen	17.505.950	7 dokumen	11.748.800	100%	67,11	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	12 dokumen	19.076.868	12 dokumen	2.348.000	100%	12,78	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	2.745.084.755	100%	2.692.873.881	100%	98,10	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 23 orang,		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	25 orang	2.745.084.755	23 orang	2.692.873.881	100%	98,10	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 23 orang,		

			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen	100%	163.565.500	100%	118.569.000	100%	72,49	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	paket	25 paket	40.492.500	23 paket	34.392.500	92%	84,94	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	25 orang	123.073.000	25 orang	84.176.500	100%	68,40	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	911.245.120	95%	745.279.853	95%	81,79	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12 laporan	137.856.000	12 laporan	125.737.000	100%	91,21	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	dokumen	48 dokumen	28.800.000	48 dokumen	20.042.400	100%	69,59	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang paket cetakan dan pengadaan yang disediakan	paket	10 paket	132.357.956	10 paket	130.045.000	100%	98,25	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	22 paket	56.414.125	22 paket	51.610.200	100%	91,48	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	39 paket	79.697.360	39 paket	70.754.100	100%	88,78	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan,		
			Sub Kegiatan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12 laporan	257.108.050	12 laporan	227.189.887	100%	88,36	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan,		

			Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	53 paket	219.011.629	53 paket	119.901.266	100%	54,75	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	persen	100%	1.358.523.440	96%	468.650.000	96%	34,50	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1 unit	772.660.353	0 unit	0	0%	0			
			Sub kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	0 unit	265.269.080	0 unit	0	0%	0			
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	24 unit	320.594.007	12 unit	462.150.000	50%	144,15	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	persen	100%	1.030.758.384	93%	934.818.898	93%	90,69	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12 laporan	189.411.384	12 laporan	148.332.402	100%	78,31	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	841.347.000	12 laporan	786.486.587	100%	93,48	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	persen	100 %	1.049.837.813	99%	957.447.971	99%	91,20	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	89 unit	243.133.150	89 unit	220.334.300	100%	90,62	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	13 unit	364.235.000	3 unit	303.375.400	100%	98,19	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau bayarkan pajak dan perijinannya	unit	29 unit	418.469.663	29 unit	355.474.171	100%	84,95	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	76 unit	24.000.000	1 unit	24.000.000	1.32%	100	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100 %	12.950.521.575	100%	12.452.958.228	100%	96,16	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan pelaksanaan medical cek up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical cek up DPRD	orang	25 orang	35.250.000	23 orang	30.701.670	92%	87,10	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	paket	14 paket	306.827.575	14 paket	262.250.000	100%	85,47	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik yang difasilitasi	dokumen	2 dokumen	150.000.000	1 dokumen	72.000.000	50%	48	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	dokumen	10 dokumen	1.895.619.044	10 dokumen	1.435.307.686	100%	75,72	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Penyelenggaraa n kajian perundang - undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	49.800.000	100%	99,60	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	dokumen	2 dokumen	26.100.000	2 dokumen	25.430.000	100%	97,43	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusuna n dan pembahasa n program pembentuk an peraturan daerah	dokumen	5 dokumen	146.096.200	5 dokumen	114.637.130	100%	78,47	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkata n kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	2.970.922.549	97%	3.351.614.080	97%	79,15	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	dokumen	6 dokumen	1.518.561.000	6 dokumen	1.048.068.774	100%	69,02	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	orang	7 orang	296.070.000	7 orang	158.934.832	100%	53,68	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan tim tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	orang	4 orang	228.000.000	4 orang	222.000.000	100%	97,37	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	dokumen	1 dokumen	211.513.000	1 dokumen	193.368.974	100%	91,42	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub kegiatan Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	dokumen	5 dokumen	716.778.549	5 dokumen	729.241.500	100%	101,74	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	persen	100%	3.251.221.665	100%	3.558.168.650,64	100%	109,44	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	dokumen	11 dokumen	3.192.371.565	12 dokumen	3.509.661.650,64	109,9%	109,94	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	laporan	1 laporan	50.000.000	1 dokumen	222.000.000	100%	97,37	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran sesuai standar	persen	100%	1.888.147.968	97%	1.552.252.051	97%	82,21	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	dokumen	2 dokumen	485.889.207	2 dokumen	556.213.174	100%	114,47	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	dokumen	2 dokumen	381.293.261	2 dokumen	307.379.882	100%	80,62	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2 dokumen	280.375.553	2 dokumen	194.785.379	109,9%	69,47	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil perubahan pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2 laporan	357.914.031	2 dokumen	156.393.378	100%	43,70	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	dokumen	2 dokumen	382.675.916	2 dokumen	337.480.238	100%	88,19	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Kegiatan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan	Persentase fasilitasi fungsi pengawasa n DPRD sesuai standar	persen	100%	572.163.454	104%	387.930.179	104%	67,80	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasa n penggunaa n anggaran	dokumen	12 dokumen	248.598.500	12 dokumen	130.442.000	100%	52,47	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasa n laporan pertanggungj awaban kepala daerah	dokumen	2 dokumen	323.564.954	2 dokumen	257.448.179	100%	79,58	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	100%	1.072.371.902	100%	1.058.250.736	100%	98,68	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan pelaksanaan reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaa n reses	dokumen	75 dokumen	1.072.371.902	75 dokumen	1.058.250.736	100%	98,68	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

Dari aspek keuangan, kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam rangka memfasilitasi Anggota DPRD Kota Blitar dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dikategorikan **berhasil**. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 31.507.968.340,- dengan realisasi Rp. 28.990.175.234,64 atau 92,01% dan dari aspek capaian kinerja dengan nilai IKM dengan target 80,5, dan realisasi hasil IKM tahun 2023 sebesar 90,1.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.B.3.1
Persentase Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kota blitar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2023		Persentase (%)	Tahun 2023			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi		Anggaran	Penyerapan Anggaran& %	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	80,5	90,25	112,1	8.901.731.644	7.606.957.646,64 (85,45%)	1.294.773.997,64	1,31
Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80,5	90	111,9	3.281.771.558	2.998.432.966 (91,37%)	283.338.592	1,22
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah “A” .	85	82,39	96,92	19.324.465.138	18.384.784.722 (95,13%,)	939.680.416	1,01

Formulasi Tingkat Efisiensi : % Kinerja : % Penyerapan Anggaran

Faktor Pendukung dari presentase tingkat efisiensi penyerapan anggaran tahun 2023 yaitu : Seluruh pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 wujud pertanggung jawaban tertulis penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretariat DPRD Kota Blitar memuat keberhasilan, kegagalan, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2023 dan merupakan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari seluruh data yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan masuk dalam kategori berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Blitar adalah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD menetapkan 1 tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris DPRD dengan Walikota Blitar atas Nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD. Capaian kinerja pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam dukungan Fungsi Pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD tercapai 100% dengan nilai indeks kepuasan Anggota DPRD : 90,25 sedang target indeks kepuasan anggota DPRD adalah 80,5 sehingga masuk dalam kategori berhasil dan baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah.

Capaian kinerja pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan dan penganggaran daerah tercapai 100% dengan nilai indeks kepuasan Anggota DPRD : 90 sedang target indeks kepuasan Anggota DPRD adalah 80,5 sehingga masuk dalam kategori berhasil dan baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah “A” dengan target nilai 85, pada Tahun 2023 nilai Sakip Sekretariat DPRD adalah “A” = 82.39.

Sedang tujuan dan indikator tujuan dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2023 adalah Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD dengan target 80,5, dan capaian Indeks IKM Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah 90,1 dalam Nilai Interval Konversi Survey Kepuasan Masyarakat termasuk kategori “Baik”. Dengan demikian target capaian kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2023 telah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan.

Sejalan dengan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, capaian realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 termasuk dalam katagori berhasil dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 92,01%.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dari evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan program, kegiatan, Sub Kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2023 maka disampaikan saran perbaikan sebagai solusi permasalahan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong seluruh Alat Kelengkapan DPRD Kota Blitar untuk Menyusun Rencana Kerja DPRD sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD dan konsisten dalam pelaksanaannya.
- b. Meningkatkan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan mengikutsertakan pada kegiatan Workshop, Bimtek atau Capacity Building guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme ASN

Sekretariat DPRD Kota Blitar.

- c. Menciptakan inovasi baru untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam fasilitasi guna peningkatan kinerja DPRD.
- d. Selalu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara Sekretariat DPRD dengan DPRD dan Instansi terkait sebagai Mitra Kerja.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Anggota DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.
- f. Menjalin dan meningkatkan komunikasi internal yang baik dengan Anggota DPRD Kota Blitar sehingga tercipta hubungan harmonis antara DPRD dengan Sekretariat DPRD guna mengatasi masalah yang sering muncul dalam penetapan kebijakan internal dan juga menjalin komunikasi eksternal yang baik pula antara Sekretariat DPRD dengan Instansi terkait

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 ini disusun untuk dapat memberikan informasi dan menggambarkan tingkat capaian kinerja dari seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar.

Blitar, 5 Februari 2024
Sekretaris DPRD Kota Blitar

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi DPRD	Melaksanakan Penyusunan rencana kerja DPRD sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	√		√
2	Meningkatkan kualitas kompetensi seluruh ASN guna meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme ASN serta peningkatan kapasitas DPRD	Melaksanakan dan meningkatkan kompetensi ASN dan DPRD dalam kegiatan Workshop, bimtek maupun capacity building	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	√		√
		Melaksanakan dan meningkatkan kompetensi DPRD dalam kegiatan workshop, bimtek	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	√		√
	Meningkatkan dukungan tenaga ahli/pakar dalam fasilitasi pembentukan peraturan daerah	Melaksanakan kerjasama dengan tenaga ahli/pakar hukum atau akademisi dalam pendampingan pembahasan pembentukan peraturan daerah	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD - Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	√		√
		Melaksanakan pendampingan dengan tenaga ahli/pakar hukum atau akademisi dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	√		√
	Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan produk hukum daerah	Melaksanakan dan memanfaatkan informasi dan data produk hukum	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		daerah dalam aplikasi JDIH	- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan			
	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dan DPRD dalam fasilitasi kordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Melaksanakan dan menjalin komunikasi yang baik antara DPRD dan Sekretariat DPRD	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	√	√	√
	Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara sekretariat DPRD dengan DPRD serta mitra kerja OPD	Melaksanakan fasilitasi dan kordinasi dengan mitra kerja OPD	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	√		√
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD	Melaksanakan peningkatan sarana prasarana kantor dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -			

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. EKA ATIKAH**
Jabatan : **Sekretaris DPRD Kota Blitar**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan penacapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

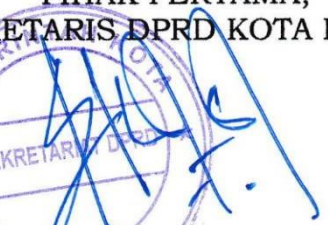
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 20 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR

PIHAK KEDUA,
PL. WALIKOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd.


Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasifungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80.50
2.	Meningkatnya fasilitasifungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	80.50
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.324.465.138.00,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.183.503.202.00,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Blitar, 20 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR



Dra. EKA ATIKAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

PIHAK KEDUA,

PIL. WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd.

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu	Realisasi	%	Ket
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	80.50	90.25	112.1	tercapai	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.901.731.644	7.606.957.646,64	85.45	tercapai
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80.50	90	111.9	tercapai		3.281.771.558	2.998.432.966	91.37	tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu	Realisasi	%	Ket
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	85	82.39	96.92	tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	19.324.465.138	18.384.784.722	95.13	tercapai

Sekretaris DPRD
Kota Blitar



Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680812 198803 2 006

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

Visi : **Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat**

Misi V : ***“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”***

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal	Target	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan
			2020	2023				2020	2023		
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	rata – rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD, IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	80.5	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	80	80.5	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD dalam fungsinya sebagai Pembentuk Peraturan Daerah dan meningkatkan kapasitas DPRD	Optimalisasi Fasilitasi bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD dalam fungsi pembentuk Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam kegiatan : 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Peningkatan Kapasitas DPRD 3. Fasilitasi Tugas DPRD

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal	Target	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan
			2020	2023				2020	2023		
										Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Blitar	Peningkatan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Blitar melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme ASN.
					Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	80.5	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran daerah	Optimalisasi Fasilitasi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran daerah dengan menetapkan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam kegiatan : 1. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	82.39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	85		


 Sekretaris DPRD
 Kota Blitar
Dra. EKA ATIKAH
 Pembina Utama Muda
 NIP.1980812 198803 2 006

Rencana Kerja Tahunan 2023
Sekretariat DPRD

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80.5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	14.525.554.475	Bagian Hukum dan Persidangan
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	3.075.809.700	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	165.312.945	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	2.643.457.005	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	12.000.000	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	236.250.000	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	18.789.750	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.991.765.390	
			Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	-		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	-		Bagian Hukum dan Persidangan
			pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	1.680.618.450	
			Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	306.404.700	
			Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	233.100.000	
			Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	271.517.400	
			Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	12	500.115.840	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	4.500.374.500	
			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	4.450.374.500	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	50.000.000	
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80.5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	3.957.613.885	Bagian Pengawasan dan Penganggaran

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.795.616.968	Bagian Pengawasan dan Penganggaran
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	474.308.780	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	474.308.780	
			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	358.320.000	
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	401.220.000	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	565.852.090	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	170.416.000	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	170.416.000	
			Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	241.651.900	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	1.271.626.335	
			Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	1.271.626.335	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.5	19.915.011.465	Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.379.245	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	18.411.645	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	17.967.600	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.129.816.563	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.129.816.563	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	112.332.990	
			Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	20.475.000	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	91.857.990	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1.089.479.460	Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	61.815.075	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	53	264.770.100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39	116.869.305	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	195.917.190	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48	20.280.000	
			Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	12	96.422.235	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	223.395.480	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	3.400.000.000	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	24	267.071.931	Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	-	-	
			Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	240.651.384	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	12	240.651.384	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	267.071.931	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	841.347.000	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	997.683.865	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	417.790.600	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	99.585.885	Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	252.918.750	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76	227.388.630	
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	13.615.335.350	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25	13.211.575.100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	14	328.760.250	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	25	75.000.000	

Sekretaris DPRD
 Kota Blitar

Dra. EVA ATIKAH
 Ketua Muda
 NIP.19680812 198803 2 006